



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

DAMPAK KENAIKAN BBM

**BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme
dan Neokolonialisme**
S. Aminah

**Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi
dan Pergeseran Peran Perempuan**
Bagong Suyanto

**Ancaman Meluasnya Kemiskinan
akibat Kenaikan BBM**
Karnaji

**Kebijakan Kesehatan di Indonesia :
Antara Market Approach dan Social Equity Model
(Perspektif Ekonomi Politik Kebijakan Publik)**
Adri Patton

**Personal Influence and Power Distance:
Acknowledging Local Culture Influence in Conceptualising
Public Relations Practices in Asian Countries**
Ratih Puspa

**Analisis Daya Dukung Gua
untuk Pengembangan Ekowisata
(Studi Kasus: Gua Gong dan Gua Tabuhan, Kabupaten Pacitan)**
Chafid Fandeli, Tjahyo Nugroho Adji

Pembangunan Ekowisata di Indonesia
Nur Emma Suriani, Nurdin Razak

**Resensi Buku
Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku**
Doddy S. Singgih

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 03 1-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Apabila membicarakan kenaikan BBM, banyak pakar diberbagai forum diskusi telah menjelaskan dan menegaskan bahwa efek yang ditimbulkan sangat multidimensional bahkan kehadiran kenaikan BBM dapat berpengaruh di kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, keamanan, hukum, sosial. Bahkan jauh sebelum kebijakan kenaikan BBM diberlakukan para analis ekonomi meramalkan ambruknya perekonomian masyarakat hanya tinggal menunggu waktu saja.

Efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM di pasaran bagaimana pun membuat masyarakat miskin makin terhimpit tanpa bisa melakukan reserve untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Ketika harga sejumlah barang kebutuhan pokok mulai merambat naik, sementara perkembangan sektor riil justru tengah lesu, maka yang terjadi kemudian adalah beban baru yang memberatkan keluarga-keluarga miskin di desa-desa miskin yang sehari-harinya sudah terbiasa hidup pas-pasan. Alih-alih kebijakan pencabutan subsidi BBM bakal membuat jumlah penduduk miskin berkurang seperti diinginkan pemerintah, yang terjadi di lapangan pasca kenaikan harga BBM adalah beban baru yang mesti ditanggung penduduk miskin menjadi makin berat. Dalam kenyataan tidak jarang terjadi penduduk yang semula miskin menjadi makin miskin dan berkekurangan karena mereka makin tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup yang makin berat.

Seperti biasanya, dengan dalih untuk mengurangi beban APBN yang semakin berat –karena harga minyak dunia mulai melambung di atas ambang psikologis– di satu sisi dan membantu masyarakat miskin di sisi lain, pemerintah mulai mengeluarkan jurusnya untuk meredam kemarahan masyarakat miskin dengan program BLT (bantuan langsung tunai) hasil dari dana kompensasi kenaikan BBM. Meskipun hanya Rp 300.000 per tiga bulan, untuk mengentas masyarakat miskin tentu saja dana sebesar itu belum cukup membantu meringankan beban masyarakat, karena bahan pokok sudah mulai naik lebih dahulu bahkan sebelum pengumuman kenaikan BBM disosialisasikan oleh pemerintah. Sekali lagi program-program yang digulirkan pemerintah acapkali bersifat karitatif dan tambal sulam sehingga tidak sampai menyentuh ke akar permasalahan sesungguhnya.

Berbagai artikel, serta hasil penelitian yang diolah redaksi tidak lain adalah berbagai efek yang terjadi semenjak digulirkannya kebijakan kenaikan BBM, selain terdapat berbagai tulisan di luar topik utama, antara lain: pada lingkup politik S. Aminah membahas BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme; kemudian Bagong Suyanto mengulas tentang Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi dan Pergeseran Peran Perempuan; Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM oleh Karnaji; Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Antara Market Approach dan Social Equity Model dipaparkan Adri Patton; Ratih Puspa menyajikan Personal Influence and Power Distance: Acknowledging Local Culture Influence In Conceptualising Public Relations Practices In Asian Countries; Analisis Daya Dukung Gua untuk

Pengembangan Ekowisata oleh Chafid Fandeli dan Tjahyo Nugroho Adji; Nur Emma Suriani dan Nurdin Razak membahas tentang Pembangunan Ekowisata di Indonesia serta resensi buku Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku oleh Doddy Sumbodo Singgih.

Harapan redaksi semoga keberadaan *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide demi perbaikan proses pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Redaksi

Topik Utama Edisi No. 1 (Januari) 2006:
Agenda Permasalahan Tahun 2006

BBM DALAM PERGULATAN SKENARIO NEOLIBERALISME DAN NEOKOLONIALISME

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme

S. Aminah

1

Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi dan Pergeseran Peran Perempuan

Bagong Suyanto

15

Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM

Karnaji

27

Kebijakan Kesehatan di Indonesia :

Antara Market Approach dan Social Equity Model (Perspektif Ekonomi Politik Kebijakan Publik)

Adri Patton

41

Personal Influence and Power Distance:

Acknowledging Local Culture Influence in Conceptualising Public Relations Practices in Asian Countries

Ratih Puspa

57

Analisis Daya Dukung Gua untuk Pengembangan Ekowisata (Studi Kasus: Gua Gong dan Gua Tabuhan, Kabupaten Pacitan)

Chafid Fandeli & Tjahyo Nugroho Adji

67

Pembangunan Ekowisata di Indonesia

Nur Emma Suriani & Nurdin Razak

81

Resensi Buku

Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku

Doddy S. Singgih

95

DAMPAK INDUSTRIALISASI MIGAS TERHADAP EKSISTENSI DAN PERGESERAN PERAN PEREMPUAN*

Bagong Suyanto

Ketua Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Abstract

As long as woman status in society and family is still considered as the second class citizen, hence as long as that woman entrepreneurship isn't run well. To maximize and improve woman's role in entrepreneurship, especially in area of oil and gas exploration, it doesn't only need government's involvement in micro business, but it also needs some efforts to abolish various gender discrimination form which the women experience.

Keywords: *the second class citizen, woman entrepreneurship, gender discrimination*

Pembangunan, industrialisasi dan kegiatan eksplorasi migas di mana pun, tak terkecuali di wilayah Propinsi Jawa Timur sesungguhnya selalu akan melahirkan sejumlah dilema. Di satu sisi industrialisasi dan eksplorasi migas diharapkan dapat menjadi jalan keluar dan pintu terobosan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan. Tetapi, di sisi yang lain industrialisasi dan investasi berbagai kekuatan komersial di sektor pertambangan migas ternyata tak jarang malah melahirkan proses marginalisasi, kerusakan ekologis dan tidak berkesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya kaum perempuan yang seringkali memang menjadi korban

pertama dari proses perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Berbagai kajian telah banyak membuktikan bahwa kehadiran perusahaan pertambangan di sebuah wilayah, terlebih di wilayah pedesaan seringkali mengancam posisi dan bahkan merubah total peran perempuan, baik peran produktif maupun peran reproduktif yang selama ini mereka kembangkan. Ketika industrialisasi mulai masuk berikut semua pranata sosial yang menyertainya, maka dapat dipastikan sejumlah perempuan niscaya akan kehilangan wilayah kelolanya, dan bahkan bukan tidak mungkin akan mematikan peran produktif perempuan. Padahal, kekuasaan manusia akan alat reproduksinya yang merupakan

* Hasil Studi Kerjasama LPPM Unair dengan Balitbang Propinsi Jatim:

wilayah kelolanya akan sangat besar pengaruhnya terhadap akses-akses yang lain, seperti akses politik, informasi, dan akses pengambilan keputusan serta hubungan-hubungan sosial (Susmiyati, dalam Jurnal Perempuan No. 37, 2003: 8).

Secara garis besar, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan industrialisasi, khususnya di sektor pertambangan terhadap peran perempuan selain hilangnya wilayah kelola perempuan, dan meningkatnya beban kerja perempuan, yang tak kalah mencemaskan adalah terjadinya proses marginalisasi perempuan, yang ujung-ujungnya akan diikuti pula dengan terjadinya proses depolitisasi peran perempuan. Di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang menarik minat investor, seperti sumber migas sudah tentu perubahan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan akan lebih dini terjadi dan lebih cepat karena dihela masuknya industrialisasi dan para pendatang. Posisi dan latar belakang perempuan di pedesaan yang acapkali kurang berpendidikan, dan tak berkeahlian, seringkali membuat mereka harus tersisih dari iklim persaingan di bidang ketenagakerjaan.

Di Propinsi Jawa Timur sendiri, saat ini sejumlah daerah yang diketahui memiliki potensi sumber daya alam migas adalah Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Gresik. Di Kabupaten Bojonegoro, tambang minyak dilaporkan termasuk kawasan Blok Cepu, tetapi yang paling banyak dilaporkan ada di kawasan Bojonegoro, yakni di Banyuwirip dan Jambaran di Kecamatan Ngasem, Sukowati dan Kemuning yang ada di Kecamatan Bojonegoro. Potensi migas yang ada di Bojonegoro diprediksi sekitar 198 triliun rupiah, belum termasuk hasil

penjualan gas. Pengelolaan migas di Kabupaten Bojonegoro ini ditangani oleh Exxon Mobil Indonesia dengan sistem bagi hasil dengan Pertamina, sedangkan Petro China sebagai operator lapangan. Di Kabupaten Tuban dan Gresik, potensi migas yang ada memang tidak sebesar yang ada di Bojonegoro. Tetapi, meskipun demikian pengelolaannya tetap menarik minat para investor.

Di tahun 2005 ini, kegiatan eksplorasi migas di Propinsi Jawa Timur sudah mulai dan sedang berjalan. Layaknya kegiatan industrialisasi yang lain, operasional eksplorasi migas di sejumlah kabupaten di Jawa Timur ini sudah barang tentu akan melahirkan sejumlah perubahan baru, dan karena itu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian baru pula di kalangan masyarakat lokal sekitar lokasi eksplorasi. Bagi kaum perempuan, agar mereka tidak menjadi korban dan tersisih dari dinamika perubahan yang terjadi di kawasan eksplorasi migas ini, tentu ada sejumlah hal yang harus dilakukan dan dikembangkan agar penetrasi industrialisasi pertambangan migas itu tidak menimbulkan proses marginalisasi dan alienasi kaum perempuan.

Di bidang kewirausahaan, secara obyektif harus diakui bahwa peran perempuan sebetulnya cukup menonjol, dan bahkan kinerja mereka cenderung lebih baik daripada laki-laki (lihat: Jurnal Analisis Sosial Vol. 8, No. 2 Oktober 2003). Di sektor perdagangan tradisional, di sektor informal, dan industri kecil, peran perempuan seringkali terbukti sangat strategis, baik sebagai tenaga kerja produksi, pemasaran atau juga di bidang pengelolaannya. Tetapi, yang menjadi masalah: ketika kebijakan pembangunan acapkali tidak berpihak kepada perempuan

dan konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat seringkali pula menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat, maka jangan heran jika perubahan yang timbul akibat industrialisasi kemudian malah memojokkan peran perempuan.

Sejumlah Perubahan

Secara teoritis, ketika kegiatan industrialisasi hanya mengeksploitasi sumber daya alam, dan tidak melakukan reinvestasi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya kaum perempuan, maka dapat dipastikan akan terjadi sejumlah perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya —yang bukan hanya mengancam kelangsungan ekosistem, tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat dan peran strategis kaum perempuan setempat. Secara garis besar, sejumlah perubahan yang rawan terjadi dan menimpa perempuan di kawasan eksplorasi migas adalah:

Pertama, kehadiran perusahaan dan kekuatan komersial di wilayah eksplorasi migas, niscaya akan melahirkan perubahan struktural yang memaksa kaum perempuan melakukan reposisi atas peran-peran kewirausahaan mereka. Di wilayah manapun, industrialisasi niscaya akan menyebabkan terjadinya perubahan karena didorong tiga faktor, yaitu proses komersialisasi, infiltrasi dan invasi para pendatang, dan proses difusi.

Kedua, kehadiran industrialisasi dan eksplorasi migas niscaya akan melahirkan pergeseran dan perubahan budaya masyarakat, termasuk di dalamnya adat-istiadat, tradisi, hukum adat, norma lokal, ritus, gaya hidup, dan bahkan nilai-nilai budaya yang menjadi kerangka acuan

berpikir dan hidup masyarakat lokal. Sebuah komunitas atau masyarakat desa yang semula hidup dalam suasana yang personal, niscaya mereka cepat atau lambat akan melakukan proses adaptasi —di mana sebagian kaum perempuan mungkin berhasil, tetapi sebagian perempuan yang lain mungkin gagal sehingga terpaksa harus tersisih dari kehidupan baru yang lahir karena dihela industrialisasi.

Ketiga, kehadiran industrialisasi dan eksplorasi migas dalam beberapa kasus acapkali pula melahirkan potensi pergesekan, dan bahkan konflik yang sifatnya terbuka, karena adanya harapan yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika di sebuah wilayah yang relatif belum berkembang, hadir sebuah perusahaan multinasional dengan seluruh pranata yang dimilikinya. Mulai dari soal rekrutmen pegawai, keeksklusifitas gaya hidup para pendatang, pranata kerja, dan sebagainya jelas perusahaan itu memiliki kriteria dan mekanisme tersendiri, yang dalam banyak hal tidak mungkin dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat, khususnya kaum perempuan yang kebanyakan secara sosial belum memiliki kemampuan dan basis sosial yang memadai. Pertemuan dua subkultur yang berbeda dalam sebuah proses perubahan sosial dan budaya —terlebih antara kultur dunia industri dan kultur masyarakat lokal, yang acapkali dinilai tidak paralel dengan kepentingan dunia industri— tidak mustahil akan potensial memicu terjadinya pergesekan bila tidak dikelola dengan baik.

Berkaca dari pengalaman di masa lalu, kini telah disadari bersama bahwa industrialisasi dan kegiatan eksplorasi

migas di wilayah manapun, mau tidak mau harus dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada komunitas lokal. Artinya, perhitungan-perhitungan yang sifatnya rasional-ekonomi yang biasa dikembangkan kekuatan komersial harus berjalan seiring dengan tanggungjawab sosial yang mewujud dalam kesejahteraan masyarakat secara luas. Seperti dikatakan Gadis Arivia (2003), bahwa di era otonomi daerah seperti sekaang ini, benar-benar dibutuhkan paradigma baru di mana setiap industri pertambangan diwajibkan untuk memberdayakan masyarakat lokal, khususnya kaum perempuan untuk sampai ke tahap di mana tingkat kesejahteraannya mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya (lihat: Jurnal Perempuan No. 27, 2003: 5).

Studi yang tengah dilaporkan ini, selain bermaksud mengkaji peran perempuan dalam kewirausahaan di wilayah eksplorasi migas dan dampak kegiatan eksplorasi migas di Jawa Timur terhadap perempuan, juga sekaligus bermaksud merumuskan program-program pembangunan yang perlu dikembangkan untuk mendukung upaya pemberdayaan perempuan agar tidak tertinggal, dan bahkan dapat mendukung kelangsungan kegiatan eksplorasi migas di Propinsi Jawa Timur. Studi ini mendesak untuk segera dilakukan, sebab saat ini di sejumlah kabupaten di Propinsi Jawa Timur kegiatan eksplorasi migas telah dan sedang berjalan, dan jika tidak diantisipasi dengan seksama dikhawatirkan dampaknya akan dapat merugikan posisi dan peran perempuan di masa-masa yang akan datang.

Lokasi studi secara *purposive* ditetapkan di Propinsi Jawa Timur. Jumlah responden penelitian ini secara

keseluruhan ditentukan sebanyak 150 perempuan, dan mereka semua dipilih dari 3 kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, yaitu: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Lamongan sebagai wilayah yang diasumsikan terkena imbas kegiatan pertambangan migas tersebut.

Kondisi Usaha Perempuan Pasca Eksplorasi Migas

Berbagai kajian telah membuktikan bahwa perempuan umumnya sangat terlibat dalam kegiatan ekonomi demi kelangsungan hidup keluarga, dan kontribusinya cukup besar, namun ironisnya peran mereka dalam kegiatan produktif seringkali tidak diperhitungkan. Usaha produktif yang dikembangkan perempuan acapkali dianggap hanya sebagai pengisi waktu atau kerja sampingan untuk menambah penghasilan keluarga, walaupun sebenarnya porsi waktu yang dihabiskan perempuan untuk melakukan kegiatan ekonomi cukup besar dan memberikan hasil berupa uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Dewayanti, dalam Jurnal Analisis Sosial Vol. 8, No. 1 Februari 2003: 117-118).

Di wilayah pedesaan, sudah merupakan hal yang biasa jika perempuan bukan saja berperan dalam menyelesaikan tugas-tugas domestik, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan produktif. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif bukan sekadar hanya mengisi kekosongan atau menjadi bumbu pelengkap dari usaha keluarga, tetapi kegiatan itu benar-benar dilakukan untuk menghasilkan uang atau upah demi kelangsungan hidup keluarganya, dan bahkan tidak jarang justru perempuanlah

yang menjadi tiang utama penyangga ekonomi keluarga.

Sejauhmana usaha atau kegiatan produktif yang ditekuni perempuan dapat berjalan lancar, sudah tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi, yang jelas usaha-usaha yang ditekuni perempuan umumnya tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, dan bahkan ada indikasi peran kewirausahaan perempuan dari waktu ke waktu makin menonjol. Di kalangan keluarga-keluarga miskin, terutama, peran kewirausahaan perempuan tampak makin menonjol dan strategis karena makin terbukanya peluang-peluang usaha yang tersedia, baik di sektor perdagangan tradisional, sektor informal atau di sektor industri kecil atau usaha mikro.

Dari 150 perempuan yang diwawancarai, studi ini menemukan bahwa sebagian besar perempuan (71,3%) umumnya tidak pernah berganti usaha. Dalam arti usaha yang mereka tekuni tetap eksis sekalipun di wilayah tempat tinggal mereka hadir kekuatan industrialisasi baru di sektor migas yang membawa serta berbagai pranata sosial dan arus pendatang baru yang cukup dinamis. Namun demikian, di balik cerita sukses perempuan yang tetap bertahan di tengah proses perubahan dan situasi krisis yang terjadi karena dipicu kenaikan harga BBM, bukan berarti perempuan sama sekali terbebas dari dampak perubahan

yang terjadi di sekitarnya. Studi ini menemukan ada 28,7% perempuan yang mengaku terpaksa berganti usaha setelah terjadi kegiatan eksplorasi migas di wilayah mereka.

Faktor penyebab sebagian perempuan di wilayah eksplorasi migas ini berganti usaha, selain karena kesulitan bahan baku (4%) dan kesulitan pemasaran (4%), juga karena mereka kehabisan modal (6,7%) atau karena usahanya mengalami kerugian (10%). Bagi perempuan yang diteliti, seperti juga usaha mikro lain yang ditekuni masyarakat miskin, kendala yang mereka hadapi secara umum memang struktur pasar yang belakangan ini makin sempit, kenaikan biaya produksi yang tidak terhindarkan akibat imbas efek domino kenaikan BBM, dan daya beli masyarakat yang rata-rata menurun drastis karena dipicu inflasi dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari.

Apakah perempuan yang terpaksa berganti usaha kemudian dapat bangkit kembali? Untuk membuktikan hal ini sudah tentu waktulah yang akan menjawabnya. Tetapi, dari sebagian perempuan yang mengaku pernah berganti usaha, sekitar separuhnya menyatakan bahwa kondisinya sama saja, dan hampir separuh yang lain menyatakan kondisi usahanya kembali meningkat setelah mereka berganti usaha.

Tabel 1
Mekanisme Mempertahankan dan Mengembangkan Usaha yang Ditekuni
Perempuan di Wilayah Eksplorasi Migas

Yang dilakukan bila pasar menurun	Deversifikasi jenis produksi	7,3%
	Mengurangi jumlah produksi	47,3%
	Beralih ke usaha lain	8,0%
	Menghentikan produksi untuk sementara	15,3%
	Mengurangi tenaga kerja	10,6%
Yang dilakukan bila terjadi fluktuasi harga	Mempekerjakan tenaga dari keluarga sendiri	11,3%
	Menghentikan usaha	12,0%
	Menghentikan produksi	18,7%
	Berproduksi sesuai pesanan	30,6%
	Tetap produksi, tapi pemasaran menunggu harga stabil	18,7%
Yang dilakukan bila pasar meningkat, namun produksi terbatas	Tetap produksi dan menyesuaikan harga	20,0%
	Memperbesar modal	30,7%
	Menambah tenaga kerja	12,0%
	Produksi tetap dan menjaga kualitas	26,0%
	Meningkatkan produksi	31,3%
Yang dilakukan agar usaha tetap survive	Menjaga kualitas	28,7%
	Produksi sesuai permintaan pasar	40,7%
	Melakukan deversifikasi jenis produk	16,6%
	Mempekerjakan tenaga keluarga	14,0%
Yang dilakukan bila modal usaha menurun	Pinjam/kredit	42,7%
	Mengambil sebagian tabungan	30,7%
	Menghentikan produksi	9,3%
	Mengurangi tenaga kerja	7,3%
	Memanfaatkan tenaga keluarga	10,0%

Seperti layaknya usaha mikro lain, salah satu keunggulan yang dimiliki usaha-usaha kecil yang ditekuni perempuan di wilayah eksplorasi migas adalah daya kenyal dan kemampuan menyiasati keadaan –termasuk dampak krisis dan imbas perubahan pasar yang makin tak bersahabat. Menurut pengakuan sejumlah responden, diakui bahwa dalam lima tahun terakhir, khususnya pasca kenaikan harga BBM, kondisi usaha yang mereka tekuni rata-rata tidak terlalu menguntungkan, sebagian stagnan, dan bahkan sebagian yang lain terpaksa melakukan berbagai penyesuaian. Tetapi, seperti dikatakan responden bahwa menyikapi berbagai tekanan yang harus dihadapi itu bukan berarti lantas membuat mereka menyerah begitu saja pada nasib. Sepanjang memungkinkan, perempuan yang menjadi pelaku usaha mikro di pedesaan

menyatakan bahwa mereka akan tetap berusaha mempertahankan kelangsungan usaha yang ditekuninya, sembari menunggu tekanan krisis akan berakhir dengan sendirinya. Bahkan, jika perlu mereka akan mencoba mencuri peluang dari keadaan yang sedang tidak menguntungkan itu.

Berbagai langkah yang biasa dikembangkan perempuan untuk menyiasati keadaan, terutama untuk tetap menjaga agar usaha yang mereka tekuni tetap *survive* umumnya adalah menyesuaikan dengan permintaan dan kondisi pasar. Jika permintaan pasar memang sedang menurun, menurut responden maka yang mereka lakukan adalah mengurangi jumlah produksi (47,3%). Jika harga produk dan bahan baku sedang fluktuatif, maka yang dilakukan responden adalah hanya

berproduksi sesuai pesanan yang memang sudah jelas jalur dan pembayarannya (50,6%). Di luar berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan pasar, jika dirasa masih belum cukup, maka usaha lain yang dikembangkan responden agar usahanya tetap *survive* adalah dengan melakukan berbagai langkah pengetatan, seperti mengurangi jumlah tenaga kerja dari luar keluarga, menerapkan strategi *wait and see*, atau jika terpaksa beralih ke usaha lain yang lebih menguntungkan. Bagi perempuan di daerah eksplorasi migas, salah satu yang tersisa dan diyakini tetap harus mereka pertahankan adalah daya tahan dan sikap untuk tidak mudah menyerah dengan keadaan.

Pergeseran Peran dan Beban Perempuan

Di satu sisi, kapitalisasi dan industrialisasi acap kali menimbulkan proses marginalisasi, terutama bagi kaum perempuan. Tetapi, di sisi yang lain, berseiring dengan makin berkembangnya pembangunan dan industrialisasi, maka peran perempuanlah yang seringkali justru lebih menonjol karena bentuk-bentuk strategi untuk bertahan hidup yang dikembangkan keluarga (miskin) di pedesaan kebanyakan merupakan *domain* perempuan (Dewayanti dan Chotim, 2004: xviii).

Seperti sudah disinggung di muka bahwa di wilayah eksplorasi migas di Propinsi Jawa Timur, keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif bukanlah hal yang baru. Di berbagai keluarga yang diteliti, studi ini menemukan bahwa perempuan bukan hanya bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan domestik, tetapi peran kewirausahaan perempuan juga makin

lama makin penting dan strategis, sehingga beban ganda yang mesti ditanggung perempuan acap kali menjadi lebih berat.

Di berbagai desa yang diteliti, meskipun peran perempuan dalam mencari nafkah cenderung lebih mengedepan. Namun demikian, tanggung jawab dan beban mereka untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di sektor domestik ternyata tak kunjung berkurang, dan bahkan ada kecenderungan justru makin bertambah. Seperti tampak pada Tabel V.3 meski beban perempuan di sektor domestik (76%) maupun publik (95,3%) sebagian besar sama saja, baik sebelum maupun sesudah adanya kegiatan eksplorasi migas. Tetapi, yang menarik disimak untuk beban pekerjaan di sektor domestik ternyata ada 19,3% responden yang menyatakan justru makin bertambah berat. Ini berarti, sekalipun keterlibatan dan peran perempuan dalam kegiatan produktif di sektor publik meningkat atau sama, ternyata hal itu tidak diikuti dengan berkurangnya beban perempuan untuk menyelesaikan tugas-tugas di ranah domestik. Dari 150 perempuan yang diteliti, hanya 4,7% yang menyatakan bahwa beban pekerjaan mereka di sektor domestik makin ringan pasca kegiatan eksplorasi migas.

Di wilayah pedesaan, yang namanya budaya patriarkhis dan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki umumnya memang masih kuat. Berbagai jenis pekerjaan yang selama ini dipersepsi sebagai pekerjaan perempuan, tetap menjadi tanggung jawab perempuan sekalipun waktu mereka kini sebagian besar makin tersita untuk melakukan berbagai pekerjaan di sektor publik. Setelah apapun dan sepanjang apapun jam kerja perempuan di sektor publik, ketika mereka

pulang ke rumah, maka yang namanya setumpuk pekerjaan perempuan, seperti mencuci piring, memasak, mengasuh anak, mencuci, menyetrika baju dan sebagainya, semuanya tetap harus diselesaikan perempuan.

Di kalangan masyarakat desa, sudah lazim terjadi walaupun harus bekerja di luar rumah, para perempuan umumnya memilih yang tidak jauh, dan waktu kerja yang dijalani sejauh memungkinkan senantiasa dipilih yang fleksibel. Ini semua dilakukan perempuan semata-mata karena mereka tetap tidak bisa lepas dari kewajiban dan pembagian kerja yang sudah berjalan dari generasi ke generasi. Di lingkungan masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai patriarkhis, keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik bukan saja kurang lazim, tetapi untuk sebagian juga dianggap tabu.

Studi ini menemukan bahwa berbagai jenis pekerjaan domestik, seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah, menyetrika dan mengasuh anak umumnya masih tetap menjadi tanggungjawab perempuan. Setelah kegiatan eksplorasi migas berlangsung dan keterlibatan perempuan dalam sektor publik makin intensif, tidak banyak perubahan yang terjadi tentang tanggungjawab mereka menyelesaikan berbagai tugas kerumahtanggaan. Dari 150 keluarga yang diteliti, hanya 4% yang menyatakan bahwa peran suami makin besar dalam kegiatan mencuci pakaian. Untuk pekerjaan membersihkan rumah, hanya 2% dan pekerjaan menyetrika hanya 1,4% responden yang menyatakan peran suami makin besar. Yang agak mendingin adalah keterlibatan suami pada pekerjaan pengasuhan anak. Sebanyak 20,6% responden menyatakan bahwa peran

suami dalam pengasuhan anak cenderung makin besar pasca kegiatan eksplorasi migas.

Bagi perempuan di pedesaan, secara umum memang tidak banyak pilihan dan peluang usaha yang dapat mereka raih dan kembangkan mengingat adanya beban ganda yang harus mereka tanggung. Tetapi, yang menakjubkan dengan segala kekenyalan dan keuletannya, studi ini membuktikan bahwa kemampuan adaptasi perempuan untuk menyiasati keadaan dan tekanan yang dialami tampaknya tidak malah surut. Sekalipun keterlibatan mereka di sektor publik makin intensif, tetapi kewajiban mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas domestik tetap dapat teratasi. Sepanjang nilai patriarkhis dan bisa gender masih berlangsung tampaknya beban yang ditanggung perempuan tetap berat, dan bukan tidak mungkin pada titik tertentu akan menghadapkan mereka pada sebuah dilema: bekerja, menjadi ibu rumah tangga, ataukah memilih melakukan keduanya sekaligus dengan resiko beban yang harus ditanggung menjadi teramat berat.

Kebijakan dan Program

Upaya untuk mengembangkan peran kewirausahaan perempuan harus diakui bukanlah hal yang mudah. Meskipun di lapangan terbukti perempuan memiliki daya tahan dan kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha berskala mikro yang tangguh, tetapi akibat "beban ganda" yang mereka tanggung menyebabkan ruang gerak dan peluang perempuan untuk lebih maju menjadi terhambat. Di balik kisah sukses sebagian perempuan sebagai pelaku usaha mikro, di berbagai daerah yang diteliti tidak sedikit

perempuan yang usahanya *collapse* atau berjalan di tempat karena kondisi pasar yang kurang bersahabat.

Untuk memberdayakan dan mengembangkan peran kewirausahaan perempuan, karena itu selain harus dilakukan secara terpadu, juga harus menyentuh semua aspek yang menjadi akar masalah kerentanan dan ketidakberdayaan perempuan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, studi ini menemukan paling-tidak ada lima kebijakan yang perlu mendapat perhatian dan dikembangkan Pemerintah Propinsi

Jawa Timur jika berkeinginan untuk meningkatkan peran kewirausahaan perempuan di daerah eksplorasi migas, yaitu: (1) pengembangan fasilitas modal usaha bagi perempuan, (2) mengembangkan peluang-peluang usaha baru bagi perempuan, (3) pelatihan dan peningkatan kualitas SDM perempuan, (4) perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, dan (5) pemberdayaan sosio-kultural dan pembebasan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi gender yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan.

Tabel 2
Kebijakan dan Program Pengembangan Peran Kewirausahaan Perempuan
di Wilayah Eksplorasi Migas di Propinsi Jawa Timur

Isu Prioritas	Kebijakan	Program
Sebagian besar kondisi ekonomi perempuan di wilayah eksplorasi migas umumnya miskin dan rentan	pengembangan fasilitas modal usaha bagi perempuan	- Bantuan modal usaha bagi perempuan - Pendampingan pengembangan usaha yang ditekuni perempuan
Perempuan umumnya menanggung beban ganda, baik kerja domestik maupun kerja di sektor public	Pemberdayaan sosio-kultural dan pembebasan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi gender	- Sosialisasi dan penyadaran gender - Pengembangan forum pemberdayaan perempuan di tingkat desa
Kendala pengembangan peran kewirausahaan perempuan bukan hanya datang dari laki-laki ataupun dari ruang domestik yang bias gender, tetapi juga dari struktur pasar yang kurang berpihak kepada usaha kecil.	Perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro yang ditekuni perempuan	- Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pro perempuan - Pengembangan sistem bapak-angkat yang pro perempuan - Pengembangan <i>putting out system</i> yang berpihak kepada hak pekerja perempuan
Faktor penyebab usaha yang ditekuni perempuan <i>collapse</i> , selain karena kesulitan bahan baku, dan kesulitan pemasaran, juga karena mereka kehabisan modal	Pengembangan usaha mikro yang ditekuni perempuan	- Bantuan bahan baku bagi usaha mikro yang ditekuni perempuan - Bantuan promosi produk usaha mikro yang dihasilkan perempuan - Bantuan modal usaha bagi perempuan
Peluang usaha yang tersisa bagi perempuan umumnya adalah usaha mikro	Pengembangan peluang-peluang usaha baru bagi perempuan	- Pelatihan ketrampilan alternatif bagi perempuan - Bantuan modal bagi perempuan untuk pengembangan usaha baru - Pendampingan usaha baru yang ditekuni perempuan
Sebagian besar perempuan umumnya menjadi pekerja keluarga dan pengelolaan usaha yang dilakukan cenderung lebih didominasi laki-laki	Pelatihan dan peningkatan kualitas SDM perempuan	- Pelatihan manajemen dan ketrampilan produktif bagi perempuan - Bantuan modal usaha dan teknologi produktif bagi perempuan - Pengembangan usaha mandiri bagi perempuan

Selama ini, jujur harus diakui bahwa kesempatan dan peluang perempuan untuk mengembangkan usaha produktif dan memberdayakan dirinya seringkali terhambat, karena status mereka dalam keluarga dan masyarakat umumnya hanya dianggap sebagai pekerja non-produktif dan bukan kepala Keluarga. Kesempatan perempuan untuk memperoleh bantuan modal dan mengakses lembaga perkreditan formal, misalnya, seringkali terhambat karena agunan yang dipersyaratkan lembaga tersebut biasanya atas nama laki-laki atau suami sebagai Kepala Keluarga.

Pendek kata, sepanjang status perempuan dalam keluarga dan masyarakat masih dianggap sebagai warga kelas dua, maka sepanjang itu pula upaya untuk memberdayakan peran kewirausahaan perempuan tidak akan berjalan maksimal. Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan kewirausahaan perempuan, terutama di daerah eksplorasi migas, karena itu yang dibutuhkan sebetulnya bukan sekadar kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap nasib usaha mikro yang ditekuni

perempuan, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi gender yang selama ini masih dialami perempuan. Jangan sampai terjadi, kegiatan eksplorasi migas yang berlangsung di sejumlah wilayah di Jawa Timur, justru melahirkan proses marginalisasi yang merugikan perempuan, karena tidak didahului atau minimal dibarengi dengan upaya-upaya untuk memberdayakan perempuan, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Bagi pengelola atau pemilik industri migas yang saat ini tengah melangsungkan kegiatan eksplorasi sesungguhnya akan sangat bijak jika sejak awal telah memikirkan dan memasukkan isu-isu perempuan lokal dan gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program-program CD (*Community Development*) yang mereka rancang dan tengah dikembangkan. Tanpa fokus khusus yang berpihak kepada perempuan, niscaya kegiatan eksplorasi migas yang sedang berlangsung hanya akan melahirkan pemiskinan dan peminggiran perempuan dari dinamika dan proses pembangunan yang tengah berlangsung di wilayah tempat tinggal mereka.

Daftar Pustaka

- Dewayanti, Ratih & Erna Ermawati Chotim. *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa* (Bandung: Akatiga dan ASPPUK, 2004).
- Krisnawati, Tati,. "Peluang Kerja Perempuan Miskin dan Strategi Survive", dalam: Fauzie Ridjal, Lusi Margiyani, dan Agus Fahri Husein (eds.),. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja, 1993).
- Saptari, Ratna & Brigitte Holzner,. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Grafiti Press, 1997).
- Utami, Santi Wijaya Hesti dkk., *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan* (Bantul: IP4-Lappera dan The Asia Foundation, 2001).
- Widyaningrum, Nurul dkk.,. *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil* (Bandung: Akatiga, 2003).
- Yustika, Ahmad Erani,. *Negara Vs Kaum Miskin* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- _____, *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 8/No. 2 Oktober. "Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan" (Bandung: Yayasan Akatiga. 2004).
- _____, *Jurnal Perempuan* No. 27 "Perempuan di Pertambangan" (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003).

Keywords: Impoverishment, Gender

Kendati berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas kemiskinan, tetapi jumlah penduduk miskin, terutama di berbagai daerah pedesaan dari tahun ke tahun relatif tidak banyak berubah, bahkan dalam beberapa kasus cenderung naik. Untuk tahun 2005 ini, meski belum diketahui dan belum ada data yang up to date tentang jumlah terakir penduduk miskin yang ada. Namun, akibat keputusan pemerintah menaikkan harga BBM awal bulan April 2005 diduga akan menyebabkan meluasnya kembali perkembangan jumlah penduduk miskin di berbagai daerah. Pemerintah sendiri sebenarnya bukan tidak menyadari bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan tekanan kebutuhan dan beban yang masih

ditanggung masyarakat miskin menjadi makin berat. Di tengah kondisi situasi krisis yang belum sepenuhnya pulih, telah kenaikan harga BBM ini akan menjadi pukulan susulan yang tidak mustahil kembali memerosok masyarakat miskin dalam beban krisis jilid kedua.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi agar kenaikan harga BBM tidak memberatkan masyarakat miskin, pemerintah telah merancang sebuah skema penyalangan berupa program kompensasi BBM untuk masyarakat miskin. Total dana kompensasi BBM yang disediakan untuk masyarakat miskin sebesar 17,9 triliun rupiah. Meski demikian, mengingat belum teratasinya miskin, pemerintah dengan didukung sejumlah intelektual yang berlatar dalam

